



► **PEMILU 2024**

Eks Koruptor Diberi Syarat Tambahan

Triyo Handoko & Yosef Leon
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Sembilan bakal calon senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan DIY, telah lolos tahapan verifikasi administratif, dan kini masuk pada tahapan verifikasi faktual.

Berdasarkan penelusuran *Harian Jogja*, ternyata ada bakal calon yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menjelaskan bakal calon yang pernah jadi narapidana kasus korupsi akan diberikan syarat tambahan saat mengikuti pendaftaran calon DPD DIY.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan menjelaskan proses dan tahapan bakal calon DPD DIY tidak mempertimbangkan status mantan narapidana

korupsi. “Tahapan bakal calon ini ada aturannya, ada syarat administrasinya, ada verifikasi faktual dukungan yang diberikan pendukungnya. Tetapi kalau status napi koruptor, memang tidak ada spesifik yang mengatur. Aturannya terkait itu nanti di pendaftaran di mana ada syarat tambahan



PEMILU 2024

yang harus dipenuhi, misalnya, menyatakan di media massa kalau napi korupsi dan surat pernyataan pengadilan,” kata dia, Rabu (15/2).

Hamdan menyebut tahapan bakal calon DPD dilakukan untuk seseorang yang ingin mendaftar jadi calon DPD pada pemilu mendatang.

“Ini seperti kalau di partai itu ada verifikasi partai yang kemudian apakah dinyatakan lolos atau tidak ikut pemilu.”

Eks Koruptor...

“Soal calon anggota partai yang diusung apakah narapidana korupsi atau tidak kan saat pendaftaran bukan saat verifikasi partai,” ujarnya.

Bakal calon DPD DIY, jelas Hamdan, juga belum tentu lolos dalam tahapannya. “Setelah dinyatakan lolos artinya mereka punya tiket untuk mencalonkan. Proses pencalonan ini juga ada tahapannya lagi, ada seleksinya, termasuk syarat administratif lain seperti pendidikan. Misalnya syarat pendidikan ini kami juga kerja sama dengan Kementerian Pendidikan juga, soal kependudukan apakah warga DIY juga dengan Disdukcapil untuk memverifikasi apakah benar status pendidikan dan kependudukannya” katanya.

Narapidana yang mencalonkan diri dalam Pemilu 2024, jelas Hamdan, ada syarat tambahan yang diberlakukan. “Tidak hanya DPD, semua kontestan juga,” katanya.

Kesembilan bakal calon DPD DIY sedang mengikuti tahapan verifikasi faktual tersebut antara lain Hilmy Muhammad (Gus Hilmy), GKR Hemas, A. Khudhori, Trisno Sunardi, R.A Yashinta Sekarwangi Mega, Ahmad Syaufi Soeratno, Tugiman, Sindu Kurniawan, dan Cinde Laras Yulianto. Kini verifikasi faktual sedang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan PPS. Tahapan ini akan berakhir pada 26 Februari mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja akan memfasilitasi para mahasiswa dan warga luar Jogja untuk melakukan pencoblosan pada Pemilu 2024 mendatang. Warga dengan KTP luar Jogja diminta untuk mengecek status keikutsertaan dalam Pemilu di wilayah masing-masing untuk kemudian difasilitasi melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Ketua KPU Kota Jogja, Hidayat Widodo, mengatakan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024 mendatang dilakukan dengan skema *de jure* atau berdasarkan hukum. Dengan begitu, pendaftaran pemilih mengacu pada domisili yang tertera pada KTP elektronik.

Hanya saja bagi mahasiswa dan warga luar daerah nantinya tetap dapat menggunakan hak pilih karena difasilitasi lewat DPTb. “Kami imbau agar warga yang dari luar kota atau mahasiswa itu cek di wilayah setempat harus sudah terdaftar di sana, sehingga seandainya mau menggunakan hak pilih di Jogja maka kita fasilitasi untuk DPTb,” kata Hidayat, Rabu.

Menurut Hidayat, dalam pemutakhiran data pemilih dengan sistem *de jure* warga domisili Jogja yang tidak lagi bertempat tinggal di wilayah itu datanya tidak akan dicoret oleh petugas Panitia Pemutakhiran Pemilih (Pantarlih). Nantinya petugas Pantarlih memberikan

catatan khusus atau berkoordinasi dengan perangkat kewilayahan berkaitan dengan temuan-temuan dalam proses pemutakhiran di lapangan. “Tetapi paling tidak sudah terdaftar di wilayah masing-masing, untuk KTP Jogja maka kemudian tidak boleh dicoret walaupun mereka tidak aktif di wilayah, tetapi tetap Pantarlih untuk mendata di wilayah kita,” kata dia.

Hidayat menambahkan, kepada warga luar daerah diimbau untuk melakukan pengecekan secara mandiri guna memastikan hak pilih saat Pemilu 2024 mendatang tetap terfasilitasi. “Karena syarat DPTb harus terdaftar di wilayahnya dulu baru bisa kemudian kami fasilitasi. Jangan sampai nanti belum terdaftar di wilayahnya, masuk ke kami. Ya tidak bisa,” kata dia.

Adapun proses tahapan Pemilih 2024 sekarang masuk ke agenda pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran daftar pemilih yang akan berlangsung sampai 13 Maret. KPU Jogja menerjunkan sebanyak 1.836 petugas guna memastikan coklit berlangsung dengan optimal. “Petugas akan terjun ke setiap rumah warga untuk melakukan penapisan antara data yang dimiliki KPU dengan kondisi riil masyarakat. “Nanti setiap 10 hari akan kami evaluasi, PPS akan mengevaluasi terkait dengan perkembangan Pantarlih di bawah,” ujar dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005